

Daftar Pustaka

1. Buku

- A. Muin Fahmal, 2006, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta.
- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia
- Brotodihardjo, Santoso. 1995, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung.
- Dessler, Gary, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Indeks, Jakarta.
- Harahap, Sofyan, 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*, Penerbit Quantum, Jakarta.
- Ilyas, B Wirawan, Richard Burton, 2008, *Hukum Pajak Edisi 4*, Salemba Empat Jakarta.
- Mardiasmo. 2006, *Perpajakan edisi Revisi 2006*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Marihot P Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mathis, R dan Jackson, W.2006. *Human Resources Development (Track MBA series/terjemahan)*. Prestasi Pustaka, Jakarta
- Nasucha, Sjaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Nurmantu, Safri, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Kelompok yayasan Obor
- Prakosa, Kesit Bambang, 2005, *Hukum Pajak*. Ekonisa, Yogyakarta
- S. F. Marbun, 2002, *Menggali dan menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Indonesia Dalam Buku Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Siagian, Sondang. 2003, *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta

Simbolon, Maringan Masry, 2004. *Dasar-dasar dan Administrasi Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Suandi, Erly, 2002, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, Kurniawan. (2005). *Pengantar Manajemen*. Kencana, Jakarta

Sunarto, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Amus dan Citra Pustaka Yogyakarta

The Liang Gie, 1968, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Inodnesia*, jilid III, Gunung Agung, Jakarta

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran

Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.16 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Perparkiran

3. Internet

<http://beritajogja.co.id/2014/10/08/laju-pertumbuhan-kendaraan-bermotor-di-jogja-naik-tiap-tahun/> diakses pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014

<http://www.slemankab.go.id/5235/dprd-tetapkan-4-perda-retribusi.slm> diakses pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014

<https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/11/15/249/jumlah-kendaraan-bermotor-yang-terdaftar-menurut-jenisnya-di-kabupaten-sleman-kecuali-milik-tni-2015-2016.html>, diakses pada 16 Januari 2019